

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anjing laut merupakan hewan mamalia yang berkaki, habitat anjing laut berada di pesisir pantai serta wilayah dingin seperti di kutub utara (Stone, 1995). Hewan mamalia tersebut memiliki harga nilai jual yang tinggi. Menurut IFAW (International Funds for Animal Welfare) harga nilai jual yang tinggi tersebut diberikan untuk setiap bagian dari tubuhnya dan mengakibatkan pemburuan anjing laut secara masal serta rutin dilakukan oleh para nelayan dari berbagai negara. Selain untuk dikomersilkan dengan harga jual yang tinggi, anjing laut juga digunakan untuk konsumsi pribadi (IFAW, 2016). Perburuan anjing laut dilegalkan oleh berbagai negara seperti Kanada, Greenland, Amerika Serikat, Swedia, Namibia, Islandia, Rusia, Norwegia, dan juga Finlandia menggunakan alat buru tradisional atau senjata salah satunya bernama hakapik dengan tujuan untuk tidak merusak kulit dari anjing laut. Tujuan tersirat bahwa beberapa negara tersebut ikut mendukung perburuan anjing laut yakni untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi (IDN,2019).

Penelitian ini membahas mengenai kejahatan lingkungan khususnya legalisasi perburuan anjing laut pada wilayah negara Kanada. Kanada merupakan salah satu negara yang menjadi fokus perhatian internasional terhadap permasalahan perburuan anjing laut dikarenakan banyaknya negara dan organisasi internasional yang mengecam kegiatan tersebut seperti Uni Eropa dan beberapa INGO. Uni

Eropa melakukan kecaman dengan menghentikan kegiatan ekspor dan impor perburuan anjing laut. Walaupun pemberhentian kegiatan ekspor impor ini membuat ekonomi dan industri perikanan di Kanada menjadi turun, serta menghilangkan pendapatan utama bagi para nelayan, akan tetapi kecaman tersebut tidak membuat pemerintah Kanada untuk berhenti melakukan rutinitas perburuan anjing laut (Rebecca dan Stephen, 2007). Secara histori sejarah, rutinitas perburuan anjing laut sudah dianggap sebagai tradisi sejak zaman Suku Inuit, tetapi Kanada tetap melakukan perburuan anjing laut dikarenakan alasan berkurangnya populasi ikan Cod di perairan Kanada. Menurut DFO (*Department of Fisheries and Oceans*) pemerintah Kanada turut serta dalam menyumbangkan dana sebesar \$40 juta dalam setahun untuk melakukan perburuan anjing laut guna memberikan peningkatan pada aspek perekonomian negara (Rebecca dan Stephen, 2007).

Maraknya perburuan anjing laut secara masal membuat adanya daya tarik dari organisasi internasional untuk membantu mengurangi kegiatan tersebut menggunakan beberapa strategi untuk menghentikan legalisasi perburuan anjing laut, salah satunya yakni di negara Kanada. Terdapat beberapa INGO (International Non-Government Organization) yang sudah masuk di Kanada seperti PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), IFAW (International Fund for Animal Welfare), dan Sea Shepherd. Tujuan utama dari beberapa INGO tersebut adalah menghindari adanya kejahatan lingkungan dan memperjuangkan kelestarian ekosistem laut. Dari banyaknya INGO yang masuk di wilayah Kanada, penelitian ini akan berfokus pada salah satu INGO yakni Sea Shepherd.

Sea Shepherd merupakan INGO yang berasal dari Oregon, Amerika Serikat yang berfokus pada perlindungan, pertahanan, dan pelestarian terhadap kehidupan yang ada di laut internasional dengan cara aksi langsung seperti kampanye agar satwa laut dan habitatnya terhindar dari eksploitasi ilegal dan juga kerusakan terhadap habitatnya agar tetap seimbang. Sea Shepherd tergolong sebagai organisasi advokasi transnasional dikarenakan pergerakannya membentuk jejaring lintas batas negara yang mendorong perhatian atas isu kejahatan lingkungan dengan landasan hukum serta perjanjian internasional. Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, penulis lebih jauh ingin menganalisis bagaimana peran serta upaya Sea Shepherd dalam menghentikan legalisasi perburuan anjing laut di Kanada agar populasi anjing laut tidak secara drastis menurun dan mengembalikan ekosistem laut pada hakikatnya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berawal dari latar belakang yang sudah peneliti jelaskan di atas, tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai “Bagaimana upaya Sea Shepherd dalam menghentikan perburuan legal anjing laut di Kanada?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran INGO dalam bekerjasama dengan masyarakat dan aktor penting lainnya melalui strategi-strategi khusus yang digunakan.

### 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui peran Sea Shepherd dalam menangani permasalahan kejahatan laut khususnya mengenai legalisasi perburuan anjing laut di negara Kanada.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan peneliti capai, maka penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian yakni kegunaan akademis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini digunakan untuk menjadi perkembangan mengenai upaya serta peran INGO dengan masyarakat dan aktor penting untuk mempengaruhi suatu kebijakan negara.

### 2. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat melalui analisisnya terkait upaya yang dilakukan oleh organisasi transnasional dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tentang menghentikan legalisasi perburuan anjing laut di Kanada.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menghentikan legalisasi perburuan anjing laut di Kanada, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membantu penelitian ini. Pertama, penelitian dari Erlinda Husna Amalia (2019) yang membahas mengenai tindakan Sea Shepherd terhadap perburuan paus oleh nelayan Jepang. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai Sea Shepherd sebagai INGO yang memiliki fokus pada konservasi satwa laut, salah satunya adalah melindungi perburuan paus di wilayah Jepang. Dengan menggunakan strategi Transnational Advocacy Network, Sea Shepherd berhasil menekan perburuan paus di Jepang dengan berbagai cara seperti serangkaian tindakan aksi langsung dan media sosial untuk penyebaran kampanye.

Kedua, penelitian dari Syahputra (2019) yang menjelaskan mengenai upaya organisasi advokasi transnasional melalui kerjasama dengan masyarakat adat dan perkotaan untuk memberikan edukasi tentang isu perburuan, dasar hukum, dan perlindungan orangutan melalui strategi Transnational Advocacy Network salah satunya adalah kampanye. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai peran INGO sebagai operational organization yakni bekerjasama dengan kelompok penjaga hutan untuk melindungi dan melestarikan habitat dari orangutan. Ketiga, penelitian dari Adhichaya (2018) membahas mengenai peran TRAFFIC sebagai INGO yang melakukan perlawanan terhadap kasus penyelundupan cula badak Afrika dari Afrika Selatan ke Vietnam di tahun 2010-2015. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai upaya TRAFFIC menggunakan pendekatan multidimensi dalam menyelesaikan masalah dengan menargetkan masyarakat yang didukung oleh beberapa pihak dari dunia bisnis, hiburan, hingga pemerintah. Pendekatan tersebut

memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi penyelundupan cula badak Afrika di Vietnam melalui media sosial sebagai alat penyebaran isu yang memiliki jangkauan luas, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat internasional untuk turut serta membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Ketiga, penelitian dari Wimona Zerlinda (2018) tentang kegagalan Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dalam melindungi populasi gajah di Afrika. Hasil dari penelitian tersebut yakni munculnya pasar-pasar ilegal serta penurunan populasi gajah dikarenakan perijinan yang diberikan oleh CITES pada tahun 1999 dan tahun 2008 beberapa negara yang memiliki keterkaitan dengan Afrika Selatan untuk melakukan kegiatan penjualan atas gading gajah. Alasan mengapa CITES gagal dalam melindungi populasi gajah dan menghentikan penjualan gading gajah yaitu karena adanya perubahan status apendiks populasi gajah menjadi apendiks II dan hal ini menyebabkan terbukanya kembali pasar ilegal. CITES terbatas dengan pengawasan kegiatan ekspor impor gading gajah dan tidak dapat mengawasi secara langsung dan menyebabkan populasi gajah terus menurun setiap waktunya.

Keempat, Penelitian dari Andini dan Purnaweni (2019) mengenai kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dalam menangani perdagangan ilegal trenggiling transnasional di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana pola kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS (Wildlife Conservation Society) dalam menghadapi perdagangan ilegal atas trenggiling di Indonesia menggunakan pola interaksi supplementary,

complementary, dan advesary untuk menjelaskan pendekatan kerjasama antara aktor negara dan juga aktor non-negara. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS cenderung menggunakan pola interaksi complimentary dan supplementary. Pola complementary yang digunakan tersebut sebagai bentuk untuk memberikan dukungan dan saran terkait dengan peraturan dan kebijakan Pemerintah oleh WCS kepada Pemerintah Indonesia. Sedangkan, untuk pola supplementary yang digunakan sebagai bentuk dukungan WCS kepada Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dari aparat penegak hukum.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Terkait persamaan, penelitian ini menggunakan konsep yang terdapat pada penelitian sebelumnya sebagai alat bantu analisis di penelitian ini. Kemudian, perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada upaya INGO sebagai TAN dalam menghentikan legalisasi perburuan anjing laut yang terjadi di wilayah Kanada dan menganalisis terkait perburuan anjing laut yang dilakukan oleh pemerintah Kanada meskipun sudah mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pihak. Dalam membantu menganalisis rumusan masalah, terdapat konsep yang digunakan oleh peneliti yakni konsep INGO dan konsep Transnational Advocacy.

### **1.5.1 Transnational Advocacy Network**

*Transnational Advocacy Network* (TAN) atau jaringan advokasi transnasional adalah sekelompok aktor sosial atau politik yang bekerjasama dalam mempromosikan tujuan utama serta mempengaruhi kebijakan pada tingkat internasional dengan memberikan pendekatan kepada masyarakat (Keck &

Sikkink, 1999). TAN melihat aktivisme manusia melalui berbagai perspektif seperti perlindungan lingkungan hidup, persamaan hak-hak suatu kaum, perjuangan hak asasi manusia, serta berbagai hal lainnya (Kristina Sianturi & Khurun'in, 2020). Menurut Buzan (2004) norma internasional dapat berubah karena adanya dampak dari pergerakan TAN dan juga masyarakat domestik suatu negara (Buzan, 2004). Menurut Keck dan Sikkink, TAN memiliki beberapa aktor dalam memperjuangkan tujuannya seperti organisasi internasional, NGO (Non-Governmental International) dan INGO, gerakan sosial dalam wilayah lokal, yayasan, media, gereja, organisasi kepentingan, beberapa ahli, badan-badan organisasi pemerintahan regional dan internasional, badan-badan eksekutif dan parlemen dalam suatu pemerintahan (Keck & Sikkink, 1999).

Ciri khas dari TAN sendiri yakni adanya Boomerang Pattern. Boomerang pattern sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh aktor luar terkait demi mendapatkan perhatian internasional yang ditujukan untuk membantu serta memenuhi keinginan dalam mewujudkan tujuan mereka. Perhatian yang didapatkan dari boomerang pattern sendiri adalah untuk memberikan tekanan dari aktor luar negara untuk mempengaruhi kebijakan ataupun perilaku suatu negara tersebut dalam sebuah isu tertentu (Keck & Sikkink, 1999).

Dalam upaya mewujudkan tujuan dari jaringan advokasi internasional, Keck dan Sikkink menggunakan beberapa pola atau strategi seperti *Leverage Politics*, *Symbolic Politics*, dan *Information Politics* (Keck & Sikkink, 1999). *Leverage Politics* adalah suatu strategi yang dilakukan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat atas suatu isu dengan cara bekerjasama dengan



aktor yang memiliki kekuatan, sehingga dapat lebih memperkuat kegiatan yang dilakukan. *Leverage politics* sendiri terbagi menjadi dua yaitu material leverage dan moral leverage. *Material leverage* adalah upaya yang dilakukan dalam memperoleh dana ataupun bantuan material kepada jaringan transnasional. Bantuan tersebut dapat berupa kerjasama, pungutan suara, atau bantuan ekonomi. Kemudian *moral leverage* sendiri adalah usaha dalam memperoleh dukungan kepada para aktor yang memiliki kekuatan untuk mengangkat isu dalam jaringan transnasional agar menjadi sorotan di kaca mata internasional.

*Symbolic Politics* merupakan suatu metode yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menyebarkan informasi mengenai sebuah kasus melalui simbol-simbol, aksi, maupun cerita-cerita secara luas dan dapat dijangkau oleh masyarakat dimanapun agar meningkatkan kesadaran masyarakat atas suatu kasus yang diangkat. *Information Politics* adalah suatu strategi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi kemudian menyebarkannya untuk membuka suatu isu kepada masyarakat. Informasi yang didapatkan bisa berasal dari mana saja dan pada umumnya didapatkan melalui fakta dan juga pengalaman dari aktor-aktor yang terlibat.

### **1.5.2 International Non-Governmental Organization (INGO)**

Menurut L. Leonard dalam *International Organization* dikatakan bahwa, negara-negara yang berdaulat memiliki kesadaran untuk mengembangkan cara kerjasama berkelanjutan yang lebih baik atas penanggulangan berbagai masalah, dimana kemudian negara-negara membentuk organisasi internasional guna

mencapai tujuannya tersebut (Rudy, 1993). Adapun beberapa golongan dari organisasi internasional, seperti : IGO (*International Governmental Organization*), dan NGO atau INGO (*Non-Governmental Organization*). Terdapat perbedaan diantara NGO dan INGO meliputi ; keanggotaan organisasi, lingkup kerjasama, dan mitra kerjasamanya (Rudy, 1993). INGO (*International Non-Governmental Organization*) merupakan suatu organisasi non profit yang memiliki tujuan untuk memenuhi suatu kepentingan sosial dengan advokasi dan dengan beberapa tujuan seperti ekonomi, sosial, politik, HAM, dan juga penyelamatan lingkungan (Teegen, Doh, & Vachani, 2004).

INGO dibentuk oleh perseorangan yang tidak memiliki keterkaitan dengan negara dan dapat mengorganisir dirinya sendiri. INGO pada dasarnya tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, tetapi bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Lewis&Kanji, 2009). INGO mendapatkan sumbangan berupa suntikan dana atau hal pendukung lainnya oleh berbagai aktor secara sukarela (Bagci, 2003). Untuk mencapai kepentingannya, NGO atau INGO melakukan beberapa cara seperti mengumpulkan data, kerjasama dengan aktor-aktor lain, dan melakukan beberapa aksi seperti kampanye dan juga demonstrasi. Dengan adanya kampanye yang dilakukan oleh NGO atau INGO, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan perhatian sehingga dapat mempengaruhi kebijakan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat (Prameswari, 2016).

Menurut Michael Yaiziji dan Jonathan Doh dalam bukunya yang berjudul *NGOs and Collaboration: Conflicts and Collaboration*, NGO terbagi menjadi beberapa tipe seperti:

1. Advocacy NGOs, berfokus pada pembentukan sistem ekonomi, sosial, dan politik untuk mencapai kepentingan dan ideologi tertentu dengan cara mengadakan penelitian, memperhatikan kegiatan aktor lain, menyebarkan informasi, dan lain sebagainya.
2. Service NGOs, berfokus pada pelayanan barang dan jasa bagi aktor yang tidak terpenuhi kebutuhannya.
3. Hybrid and Evolving NGOs, berfokus pada advokasi dan juga pelayanan dengan cara bersamaan.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Transnational Advocacy Network**

*Transnational Advocacy Network* (TAN) atau jaringan advokasi transnasional adalah sekelompok aktor sosial atau politik yang bekerjasama dalam mempromosikan tujuan utama serta mempengaruhi kebijakan pada tingkat internasional dengan memberikan pendekatan kepada masyarakat (Keck & Sikkink, 1999). Menurut Keck dan Sikkink, TAN memiliki beberapa aktor dalam memperjuangkan tujuannya salah satunya adalah INGO (Keck & Sikkink, 1999). Dalam memperjuangkan tujuannya, TAN memiliki beberapa strategi serta ciri khas seperti boomerang pattern (Keck & Sikkink, 1999). Sea Shepherd dapat digolongkan sebagai organisasi advokasi transnasional karena pola pergerakan yang membentuk jejaring lintas batas negara yang dalam aktivitasnya mendorong perhatian atas kejahatan terhadap anjing laut dalam kerangka kejahatan lingkungan.

### **1.6.2 International Non-Governmental Organization**

INGO merupakan suatu organisasi non profit yang memiliki tujuan untuk memenuhi suatu kepentingan sosial dengan advokasi dan dengan beberapa tujuan seperti ekonomi, sosial, politik, HAM, dan juga penyelamatan lingkungan (Teegen, Doh, & Vachani, 2004). INGO pada dasarnya tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, tetapi bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Lewis&Kanji, 2009). Terdapat beberapa tipe INGO seperti Advocacy, Service, serta Hybrid and Evolving dalam menggapai tujuan yang akan dicapai. Beberapa strategi seperti aksi kampanye, demonstrasi, mengumpulkan informasi merupakan cara INGO dalam melakukan pergerakan (Prameswari, 2016). Sea Shepherd merupakan INGO memiliki fokus pada konservasi kehidupan di laut yang masuk kedalam golongan bidang lingkungan. Sea Shepherd berusaha mencapai tujuannya untuk menyelamatkan kehidupan dan habitat yang ada di laut dengan menggunakan strategi yang telah direncanakan.

### **1.7 Argumen Penelitian**

Argumen utama dari penelitian ini adalah upaya Sea Shepherd dengan beberapa strategi yang sudah dilakukan sebagai Transnational Advocacy Network dalam menghentikan legalisasi perburuan anjing laut di Kanada untuk menghasilkan norma internasional yang baru. Meskipun upaya yang dilakukan oleh Sea Shepherd belum mencapai tujuannya untuk mengubah legalitas tersebut, tetapi upaya yang dilakukan sudah memberikan dampak besar untuk memulai menghentikan

legalisasi perburuan anjing laut di Kanada dengan mendapatkan bantuan dari beberapa aktor luar seperti negara-negara besar untuk mencapai tujuan tersebut.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif, dimana penelitian kualitatif berusaha untuk menjelaskan suatu masalah menggunakan kata-kata dan bahasa. Menurut Arthur Croplay penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membahas suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, karena Croplay menganggap bahwa realitas itu sifatnya subjektif (Croplay, 2019). Menurut Miladina dan Kurniawan (2019) penelitian kualitatif eksploratif merupakan suatu cara untuk memahami proses dan tindakan atas sebuah masalah didalam kehidupan.

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang akan peneliti gunakan informasinya untuk menyelesaikan penelitian ini. Subjek penelitian yang peneliti gunakan adalah organisasi transnasional bernama Sea Shepherd dalam upayanya menyelesaikan suatu permasalahan di wilayah internasional, khususnya pada penelitian ini yakni negara Kanada.

### **1.8.3 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk menangkap objek yang diteliti. Pada penelitian ini, situs yang digunakan yakni di wilayah Kanada.

### **1.8.4 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan yang digunakan pada penelitian ini yakni pada tahun 2012 hingga 2015 dikarenakan proses saat banyaknya perburuan anjing laut di Kanada hingga campur tangan dari Sea Shepherd untuk melakukan penurunan angka perburuan anjing laut.

### **1.8.5 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini didukung dengan referensi data yang peneliti gunakan berasal dari berita, jurnal, buku, artikel, dan juga situs internet resmi.

### **1.8.6 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan observasi. Peneliti mendapatkan dan mengumpulkan data-data guna menunjang penelitian melalui beberapa situs resmi organisasi transnasional, situs resmi berita, serta beberapa data sekunder seperti literatur dan artikel terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian.

### **1.8.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah library research dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber kredibel yang tersedia berupa jurnal, buku, berita, dokumentasi, dan juga artikel yang relevan yang ada di internet.

### **1.8.8 Teknis Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan metode kongruen. Menurut buku pedoman skripsi mahasiswa hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Diponegoro, metode kongruen merupakan mencari kesamaan atas variabel independen dan juga variabel bebas dalam teori yang digunakan dan data-data yang didapatkan. Dalam penelitian ini, variabel independen yang dimaksud adalah Sea Shepherd dan variabel bebasnya adalah norma internasional.

Proses analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian kualitatif eksploratif ini melalui 4 tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dari sumber yang tersedia di jurnal, buku, website, skripsi, thesis, dan lain sebagainya.

2. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengolahan terhadap data yang sudah dikumpulkan.

3. Penyajian data

Kemudian pada tahap ini, peneliti menyusun data yang sudah diolah dan disimpulkan. Dengan tujuan setelah melakukan tahap ini, peneliti dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

#### 4. Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang peneliti lakukan dalam menganalisis penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari data yang sudah diolah.